

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Ombolata

Desa Ombolata merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli. Desa ini memiliki makna tersendiri bagi masyarakat setempat, sebab letaknya yang berada di atas perbukitan menjadikannya sebagai wilayah yang diagungkan oleh para leluhur maupun tokoh masyarakat. Posisi geografis Desa Ombolata yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemukiman para leluhur sebelumnya bukan hanya sekadar persoalan letak topografi, melainkan juga sarat dengan nilai filosofis dan simbolik.

Menurut beberapa tokoh masyarakat, keberadaan Desa Ombolata di atas ketinggian mencerminkan suatu penghormatan terhadap warisan budaya dan sejarah masyarakat Nias. Bagi mereka, tinggal di perbukitan melambangkan kedekatan dengan kekuatan alam dan spiritualitas, serta menciptakan rasa aman dari berbagai ancaman yang datang dari luar. Hal ini pula yang menjadikan Desa Ombolata dipandang sebagai wilayah yang memiliki kedudukan penting dalam perjalanan sejarah masyarakat setempat.

Selain itu, posisi geografis Desa Ombolata memberikan pandangan yang luas terhadap wilayah sekitar, seolah menggambarkan peran strategis desa ini dalam konteks kehidupan sosial maupun budaya masyarakat. Dari ketinggian tersebut, para leluhur diyakini dapat menjaga, mengawasi, serta melindungi keturunan mereka yang mendiami wilayah tersebut. Dengan demikian, Desa Ombolata tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal,

tetapi juga sebagai simbol keagungan dan kebanggaan masyarakat Nias, khususnya di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Hingga kini, pandangan masyarakat tentang keistimewaan Desa Ombolata masih terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Identitas sebagai desa yang berada di perbukitan tetap dipelihara, baik melalui tradisi, cerita lisan, maupun berbagai aktivitas sosial budaya. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Ombolata bukan sekadar sebuah tempat tinggal, melainkan sebuah warisan leluhur yang sarat akan makna historis, filosofis, dan kultural bagi masyarakat Gunungsitoli. Nenek Moyang kami Desa Ombolata yakni Lolomatua dengan nama jabatan gelar adat Tuha Ziliwu. Kira-kira tahun 1914, Nenek Moyang dari desa Ombolata ini mendirikan tempat pemukiman baru dengan nama Banua Ombolata. Dan sebelumnya leluhur kami berasal dari Banua Onowaembo keturunan Daeli Sanau Talinga. Salawa (kepala kampung) pertama bernama Ama Wune dari tahun 1914 sampai 1918. Dari tahun 1918 sampai dengan 1926, Salawa berganti kepada Ama La'e Gea sesuai dengan musyawarah adat pada saat itu. Pada tahun 1926, terjadi pergantian Salawa kepada Faelumbowo Gea hingga tahun 1980. Salawa Faelumbowo Gea merupakan salah seorang tokoh masyarakat Negeri Idanoi dengan jabatan sebagai Sekretaris Tuhenori. Selain itu, Salawa Faelumbowo Gea melaksanakan adat kebesaran (fangowasa nori) pada tahun 1935 dengan gelar Tuha Balazi Zihono. Pada masa kepemimpinannya, masyarakat Ombolata dapat berdiri sendiri baik dari segi adat maupun agama yang mana sebelumnya masyarakat desa Ombolata secara adat bergabung dengan desa Onowaembo.

Dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1998, posisi Salawa (menjadi Kepala Desa) beralih kepada Buala Gea. Pada masa kepemimpinannya, tepat pada tahun 1993 desa Ombolata bergabung ke kecamatan Lolofitu Moi yang merupakan hasil pemekaran kecamatan Gido. Namun pada tahun 2005, desa Ombolata bergabung ke dalam wilayah Gunungsitoli Idanoi.

Kepemimpinan Desa Ombolata pada Tahun 1998, beralih kepada Nofemi Gea alias Ama Anna Gea sebagai Pejabat Kepala Desa hingga tahun 2012. Pada masa kepemimpinan Nofemi Gea, pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan berjalan dengan baik. Peningkatan pembangunan infrastruktur cukup baik.

Pada tahun 2012, di Desa Ombolata untuk pertama kalinya melaksanakan program pemilihan Kepala Desa secara langsung. Pemilihan ini diikuti oleh 2 (dua) orang calon. Dan yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah Yanisokhi Gea dengan persentase suara 60%. Dimasa kepemimpinan Yanisokhi Gea, pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan berjalan juga dengan baik serta Peningkatan pembangunan infrastruktur cukup baik.

Masa jabatan Kepala Desa Yanisokhi Gea berakhir pada bulan September 2018 dan digantikan oleh Pejabat Kepala Desa oleh Efori Gea dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

Pada bulan Desember 2018 Desa Ombolata kembali melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang diikuti oleh 3 (tiga) orang yaitu Yanisokhi Gea, Mefati Gea dan Yosafati Gea, S.Pd. Dan yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah Yosafati Gea, S.Pd dengan persentase suara 41%

Desa ombolata idanoi juga memiliki visi dan misi,yaitu sebagai berikut:

Visi

Visi Desa Ombolata ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Ombolata yakni Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan unsur masyarakat lainnya. Visi ini sangat berkaitan erat dengan latar belakang penduduk dan struktur daerah Desa Ombolata.

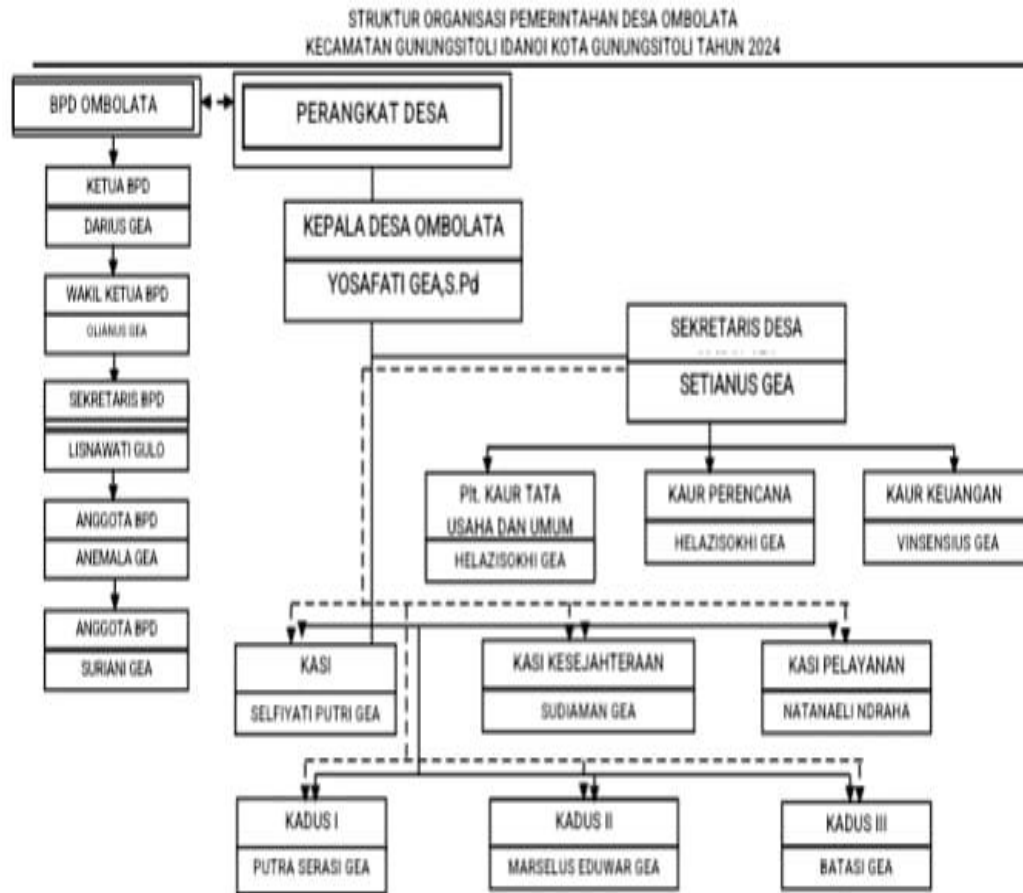
Masyarakat Desa Ombolata yang dominan beragama Kristen sangat memperhatikan nilai-nilai estetika keagamaan. Rasa kekeluargaan yang masih kentara diantara warga membuat Desa Ombolata semakin erat dalam persaudaraan. Kondisi ini membuat masyarakat Desa Ombolata selalu menjalankan program yang telah dicanangkan demi kesejahteraan dan kemandirian desa mereka sendiri.

MISI

Adapun misi dari Desa Ombolata adalah :

1. Melaksanakan Roda Pemerintah yang Jujur dan Transparan;
2. Memfungsikan Perangkat Desa sesuai dengan Tupoksinya masing-masing;
3. Melayani Masyarakat dengan niat yang tulus, efektif dan gratis;
4. Membangun relasi kepada Pemerintah Kota dan Legislatif (Wakil Rakyat);
5. Meningkatkan Pembangunan dibidang Infrastruktur dan Prasarana dilingkungan Desa Ombolata;
6. Meningkatkan Persatuan dibidang Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda;

4.1.1. Struktur organisasi



Gambar 4.1

Sumber :Olahan peneliti 2025

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dengan enam orang informan yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, serta masyarakat Desa Ombolata Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui implementasi fungsi manajemen dalam pelaksanaan program pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan program pemerintah desa pada umumnya dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok tani. Namun keterlibatan masyarakat masih belum maksimal karena tidak semua warga hadir. Kepala Desa, Yosafati Gea, menyampaikan bahwa *“perencanaan dilakukan lewat musyawarah desa, tetapi hanya sebagian masyarakat yang hadir sehingga keputusan sering hanya diwakili oleh beberapa orang.”* Hal ini dikuatkan oleh Sekretaris Desa, Setianus Gea, yang mengatakan *“dokumen perencanaan memang disusun dari hasil musyawarah, tetapi data dari masyarakat sering tidak lengkap sehingga sulit menentukan prioritas.”* Dari sisi masyarakat, Medina Laoli menambahkan *“informasi program kadang mendadak, jadi kami sulit memberi masukan.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa perencanaan program masih menghadapi kendala pada tingkat partisipasi dan sosialisasi.

Pengorganisasian sumber daya manusia, dana, dan waktu telah dilakukan melalui pembagian tugas sesuai tupoksi perangkat desa. Namun, keterbatasan SDM menyebabkan beberapa perangkat harus merangkap tugas. Selfiyanti Gea, Kasi Pemerintahan, mengungkapkan *“struktur kerja sebenarnya sudah ada, tetapi karena jumlah perangkat terbatas, koordinasi sering kurang efektif.”* Hal senada disampaikan oleh Setianus Gea yang menyebutkan bahwa *“administrasi sudah berjalan, tetapi staf terbatas membuat pekerjaan menumpuk.”* Dari sisi masyarakat, Fahela Gea menilai *“kami lihat ada pembagian kerja, tapi kadang yang kerja itu-itu saja.”* Selain

itu, keterbatasan anggaran juga membuat pemerintah desa harus memprioritaskan program tertentu, seperti pembangunan jalan, sementara program pemberdayaan ekonomi masyarakat belum berjalan maksimal.

Pelaksanaan program yang bersifat fisik seperti pembangunan jalan dan fasilitas kesehatan berjalan cukup baik karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat melalui gotong royong. Kepala Desa menyampaikan bahwa *“program pembangunan jalan dan kesehatan berjalan baik karena masyarakat mau bergotong royong.”* Akan tetapi, pada program non-fisik seperti pemberdayaan ekonomi dan pertanian, partisipasi masyarakat rendah. Hal ini diakui oleh Fahela Gea, yang menyatakan *“program jalan sangat bermanfaat, tapi untuk kelompok tani kami merasa kurang mendapat bimbingan setelah program berjalan.”* Pernyataan ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program lebih berhasil pada sektor infrastruktur dibandingkan sektor pemberdayaan.

Pengawasan dilakukan oleh perangkat desa melalui laporan pertanggungjawaban dan monitoring tahunan. Namun, pengawasan masyarakat belum terlibat secara aktif. Yosafati Gea menegaskan bahwa *“pengawasan memang dilakukan, tetapi belum ada tim independen dari masyarakat yang ikut mengawasi.”* Hal ini diperkuat oleh Selfiyanti Gea yang menuturkan *“pengawasan hanya lewat laporan rutin, jarang ada evaluasi langsung di lapangan.”* Dari sisi masyarakat, Medina Laoli menyampaikan bahwa *“kami hanya dengar laporan di gereja atau balai desa, tapi tidak melihat detail penggunaannya.”* Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan masih cenderung administratif dan kurang menyentuh aspek transparansi.

Evaluasi program dilaksanakan setiap akhir tahun dalam bentuk laporan tahunan. Namun, sifatnya masih formalitas. Selfiyanti Gea menyatakan bahwa *“evaluasi memang ada, tapi lebih kepada laporan administratif, belum menyentuh masalah secara mendalam.”* Masyarakat pun menegaskan hal yang

sama. Dalizatulo Gea mengungkapkan bahwa *“evaluasi hanya disampaikan lewat laporan tahunan, bukan evaluasi bersama masyarakat.”* Dengan demikian, evaluasi program belum sepenuhnya menjadi sarana perbaikan, melainkan sebatas kewajiban administrasi.

Faktor pendukung utama pelaksanaan program pemerintah desa adalah adanya dana desa, semangat gotong royong masyarakat, dukungan tokoh masyarakat, serta bantuan teknis dari pemerintah kota. Kepala Desa menegaskan bahwa *“dana desa dan gotong royong masyarakat menjadi kekuatan utama dalam melaksanakan program.”* Hal ini diperkuat oleh Selfiyanti Gea yang menyampaikan *“dukungan dari pemerintah kota sangat membantu, terutama dalam bentuk bimbingan teknis.”* Dari sisi masyarakat, Fahela Gea menambahkan bahwa *“kalau pembangunan jalan, kami semangat gotong royong.”*

Di sisi lain, faktor penghambat yang ditemukan adalah keterbatasan anggaran, kurangnya SDM perangkat desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program non-fisik, serta minimnya sosialisasi program. Selfiyanti Gea menuturkan bahwa *“kurangnya sosialisasi membuat sebagian masyarakat tidak mengetahui program secara detail.”* Medina Laoli juga menyoroti bahwa *“pembagian bantuan tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan.”* Sedangkan Dalizatulo Gea menegaskan *“program air bersih sempat tertunda karena dana tidak cukup, padahal itu kebutuhan mendesak.”*

Dalam menghadapi hambatan, pemerintah desa melakukan beberapa langkah, antara lain dengan memprioritaskan program yang dianggap paling mendesak, mengajukan bantuan tambahan ke pemerintah kota, serta mendorong masyarakat untuk bergotong royong. Kepala Desa menyampaikan bahwa *“kami prioritaskan program yang paling penting, sisanya ditunda,”* sementara masyarakat menilai bahwa solusi sering dilakukan dengan cara gotong royong untuk menutupi kekurangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi manajemen di Desa Ombolata Idanoi sudah berjalan namun belum optimal. Fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi telah dilakukan, tetapi masih terdapat kelemahan terutama pada aspek partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, dan minimnya pengawasan. Faktor pendukung utama adalah adanya dana desa dan semangat gotong royong masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan SDM, kurangnya sosialisasi, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program non-fisik.

hasil penelitian:

1. Perencanaan program desa melibatkan masyarakat, tetapi partisipasinya rendah dan usulan sering tidak diakomodasi.
2. Pengorganisasian sudah ada, namun terbatasnya SDM dan anggaran menyebabkan perangkat merangkap tugas dan beberapa program ditunda.
3. Pelaksanaan program fisik (jalan, kesehatan) berjalan baik karena dukungan gotong royong, sementara program non-fisik kurang optimal.
4. Pengawasan cenderung administratif melalui laporan, keterlibatan masyarakat masih minim.
5. Evaluasi dilakukan setiap tahun, tetapi hanya sebatas formalitas dan tidak menyentuh masalah secara mendalam.
6. Faktor pendukung utama adalah dana desa, gotong royong masyarakat, serta dukungan pemerintah kota.
7. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan anggaran, SDM perangkat desa, minimnya sosialisasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat pada program non-fisik.

8. Upaya penyelesaian hambatan dilakukan dengan memprioritaskan program mendesak, mengajukan bantuan eksternal, dan mengandalkan gotong royong.

4.3 Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi fungsi manajemen dalam pelaksanaan program pemerintah Desa Ombolata Idanoi telah dijalankan, namun masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini dapat dianalisis melalui teori fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Dalam kerangka manajemen pembangunan desa, fungsi perencanaan menempati posisi yang sangat penting. Pemerintah Desa Ombolata Idanoi telah berupaya melaksanakan fungsi ini melalui penyelenggaraan musyawarah desa (musdes) yang bertujuan untuk merumuskan program kerja tahunan maupun jangka menengah. Musyawarah desa menjadi forum partisipatif yang di dalamnya terdapat interaksi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kelompok perempuan, perwakilan pemuda, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Forum ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyerap aspirasi warga, menyamakan persepsi, dan menyusun prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Upaya tersebut secara teoritis sejalan dengan pendapat Terry (2017) yang mendefinisikan perencanaan sebagai proses penentuan tujuan serta tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan juga sebagai pedoman arah pembangunan desa yang sistematis. Perencanaan yang baik diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, menyesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada, serta meminimalisir berbagai hambatan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Namun demikian, hasil observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Ombolata Idanoi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif. Meskipun musyawarah desa telah dilaksanakan secara rutin, tingkat keterlibatan masyarakat masih rendah. Banyak warga desa yang tidak hadir dalam forum perencanaan, sementara yang hadir cenderung didominasi oleh tokoh-tokoh tertentu yang sudah memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Situasi ini menyebabkan keputusan yang diambil dalam musyawarah lebih mencerminkan kepentingan kelompok kecil dibandingkan kebutuhan menyeluruh seluruh lapisan masyarakat.

Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa mengenai waktu, tempat, dan agenda musyawarah belum maksimal. Informasi seringkali hanya sampai pada kalangan tertentu dan tidak menjangkau seluruh warga, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat desa. Kedua, masih terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa pembangunan merupakan urusan pemerintah desa semata, sehingga keterlibatan warga dalam perencanaan dianggap tidak begitu penting. Ketiga, adanya hambatan psikologis dan keterbatasan kapasitas, di mana sebagian masyarakat merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan gagasan dalam forum resmi. Hal ini membuat suara kelompok rentan, seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin, seringkali tidak terwakili.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa sudah menjalankan prosedur perencanaan sesuai dengan regulasi, namun esensi pembangunan partisipatif belum sepenuhnya tercapai. Padahal, menurut Kuncoro (2018), pembangunan desa yang partisipatif adalah pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek. Artinya, masyarakat harus dilibatkan aktif sejak tahap identifikasi masalah, penentuan prioritas, hingga penyusunan program dan alokasi anggaran. Partisipasi

masyarakat yang luas akan meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap program pembangunan, sehingga pelaksanaan dan keberlanjutannya dapat terjamin.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Ombolata Idanoi juga berdampak pada kualitas program kerja yang dihasilkan. Beberapa program terkadang kurang tepat sasaran karena tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Misalnya, pembangunan infrastruktur fisik sering menjadi prioritas utama, sementara aspek nonfisik seperti pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, maupun peningkatan kualitas pendidikan kurang mendapat perhatian. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam menentukan prioritas pembangunan desa.

Selain itu, keterbatasan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat juga menjadi hambatan tersendiri. Sosialisasi program sering dilakukan secara terbatas dan kurang interaktif, sehingga masyarakat tidak memahami sepenuhnya tujuan dan manfaat dari program yang direncanakan. Kondisi ini menimbulkan jarak antara pemerintah desa dengan masyarakat, di mana masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2019), keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam merumuskan keputusan.

Fungsi pengorganisasian merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen pembangunan desa. Di Desa Ombolata Idanoi, fungsi ini sudah berjalan dengan adanya pembagian tugas perangkat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, serta kepala dusun memiliki peran dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap perangkat desa diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara optimal sehingga roda

pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musyawarah desa.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengorganisasian di Desa Ombolata Idanoi belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Jumlah perangkat desa yang terbatas sering kali menyebabkan adanya rangkap tugas. Misalnya, seorang kepala urusan tidak hanya mengerjakan tugas di bidang administrasi, tetapi juga harus membantu dalam bidang pembangunan fisik atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini membuat efektivitas kerja perangkat desa menjadi menurun karena beban kerja yang melebihi kapasitas individu.

Menurut Hasibuan (2019), pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian ini, pengorganisasian tidak hanya menyusun struktur organisasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh perangkat desa berjalan selaras dan saling mendukung. Namun dalam konteks Desa Ombolata Idanoi, meskipun struktur organisasi pemerintahan desa sudah terbentuk sesuai aturan, keterbatasan tenaga dan minimnya anggaran mengakibatkan proses pengorganisasian belum optimal.

Selain permasalahan jumlah SDM, faktor kapasitas juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa perangkat desa masih memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi, administrasi, maupun manajemen program. Hal ini berdampak pada kinerja pengorganisasian yang tidak maksimal, misalnya dalam hal pencatatan data, penyusunan laporan, maupun koordinasi antarperangkat desa. Padahal, tuntutan administrasi pemerintahan desa di era modern semakin kompleks, karena desa tidak hanya menjadi unit pemerintahan terkecil, tetapi juga sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Keterbatasan anggaran desa juga memengaruhi kualitas pengorganisasian. Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima memang menjadi sumber utama pembiayaan, namun porsi anggaran lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik dan program prioritas lain, sehingga pembiayaan peningkatan kapasitas perangkat desa sering kali tidak menjadi fokus utama. Kondisi ini membuat pengorganisasian di Desa Ombolata Idanoi cenderung berjalan apa adanya, tanpa adanya inovasi untuk memperkuat struktur kelembagaan maupun kapasitas SDM.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi efektivitas pengorganisasian adalah lemahnya koordinasi antarperangkat desa. Dalam beberapa kasus, pembagian tugas memang sudah ditetapkan, tetapi koordinasi lintas bidang belum berjalan maksimal. Misalnya, kepala seksi pembangunan tidak selalu berkoordinasi dengan kepala dusun dalam merencanakan program pembangunan di tingkat dusun, sehingga sering terjadi tumpang tindih program atau keterlambatan pelaksanaan. Menurut Handoko (2018), pengorganisasian yang baik harus mampu menciptakan koordinasi yang harmonis antara bagian-bagian organisasi sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam konteks desa, pengorganisasian yang efektif seharusnya tidak hanya sebatas pembagian tugas, tetapi juga harus mampu menciptakan kerjasama yang erat antarperangkat desa dan masyarakat. Struktur organisasi yang ada perlu dilengkapi dengan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang jelas. Namun kenyataannya, di Desa Ombolata mekanisme tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan jumlah perangkat desa yang membuat mereka lebih fokus pada penyelesaian tugas teknis dibandingkan dengan membangun koordinasi yang berkesinambungan.

Untuk memperbaiki kondisi ini, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa Ombolata. Pertama, pemerintah desa perlu mengajukan penambahan tenaga perangkat desa sesuai dengan

kebutuhan agar beban kerja dapat dibagi secara proporsional. Kedua, peningkatan kapasitas perangkat desa harus menjadi prioritas, baik melalui pelatihan, workshop, maupun pendampingan teknis yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, maupun teknologi informasi. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, perangkat desa dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih profesional dan efisien.

Ketiga, pemerintah desa harus memperkuat mekanisme koordinasi melalui rapat internal rutin yang membahas perkembangan program dan kendala yang dihadapi. Rapat ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi harus menjadi forum evaluasi yang mendorong terjadinya kolaborasi antarperangkat desa. Keempat, perlu adanya penguatan kelembagaan desa melalui pemanfaatan teknologi, misalnya penggunaan aplikasi sistem informasi desa (SID) untuk mempermudah administrasi dan pelayanan publik. Dengan adanya sistem berbasis digital, efektivitas pengorganisasian dapat ditingkatkan meskipun jumlah perangkat desa terbatas.

Pada fungsi pelaksanaan, program fisik seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur desa berjalan relatif baik karena didukung gotong royong masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Koontz & Weihrich (2018) bahwa pelaksanaan manajemen memerlukan motivasi, komunikasi, dan kerja sama. Namun, program non-fisik seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang berhasil karena partisipasi rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara program fisik yang mudah dilihat hasilnya dan program non-fisik yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan.

Dalam fungsi pengawasan, pemerintah desa melakukan monitoring dan laporan pertanggungjawaban setiap tahun. Namun, pengawasan masih bersifat administratif dan belum melibatkan masyarakat secara aktif. Menurut Siagian (2016), pengawasan seharusnya dilakukan tidak hanya untuk menilai, tetapi juga untuk memperbaiki penyimpangan sejak dini. Fakta di lapangan

menunjukkan bahwa evaluasi lapangan jarang dilakukan, sehingga potensi masalah baru teridentifikasi pada akhir program.

Fungsi evaluasi dilaksanakan setiap tahun melalui laporan tahunan, namun sifatnya lebih formalitas daripada evaluasi mendalam. Evaluasi seharusnya berfungsi sebagai dasar perbaikan program, tetapi dalam praktiknya hanya sebatas kewajiban administratif. Hal ini mengindikasikan bahwa siklus manajemen di desa belum berjalan penuh, karena hasil evaluasi belum digunakan sebagai dasar perencanaan berikutnya.

Terkait faktor pendukung, adanya dana desa, semangat gotong royong masyarakat, dukungan tokoh masyarakat, serta bantuan teknis dari pemerintah kota menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan program. Temuan ini mendukung penelitian Siregar (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan program desa sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, faktor penghambat yang dominan adalah keterbatasan anggaran, kurangnya SDM perangkat desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya sosialisasi. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Hutabarat (2021) yang menemukan bahwa keterbatasan aparatur desa dan rendahnya kualitas data masyarakat menyebabkan program desa tidak berjalan efektif. Selain itu, penelitian Simanjuntak (2022) juga mengungkapkan bahwa rendahnya pengawasan masyarakat membuat pelaksanaan dana desa rentan digunakan tanpa evaluasi yang mendalam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi manajemen di Desa Ombolata Idanoi sudah berjalan, tetapi belum optimal. Fungsi manajemen cenderung lebih efektif dalam program fisik, namun lemah dalam program non-fisik. Hal ini memperlihatkan bahwa masih ada kesenjangan antara teori manajemen yang ideal dengan praktik di lapangan.

Dengan membandingkan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas fungsi manajemen di desa sangat ditentukan oleh tiga faktor kunci, yaitu (1) partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan program, (2) kapasitas aparatur desa, dan (3) keberlanjutan pendampingan dari pemerintah maupun pihak eksternal. Untuk meningkatkan keberhasilan program, Desa Ombolata Idanoi perlu memperkuat perencanaan partisipatif, meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan, memperluas mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, serta mendorong keberlanjutan evaluasi yang digunakan sebagai dasar perbaikan program.